
BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan dampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi yang terus berlanjut tanpa kepastian akan berakhirnya, ditenggarai karena lemahnya fundamental ekonomi Indonesia yang terbentuk selama ini. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya fundamental ekonomi antara lain adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia, pembangunan yang masih bergantung kepada beaya dari sumber hutang luar negeri, serta masih lemahnya kepastian hukum. Apalagi dengan naiknya harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tanggal 01 Oktober 2005 yang lalu, tentu saja semakin menambah berat kondisi kehidupan masyarakat bawah. Meskipun kebijakan tersebut diimbangi dengan dikeluarkannya kebijakan subsidi tunai langsung sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, namun jumlahnya tidak memadai jika dibandingkan dengan inflasi yang ditimbulkannya.

Kondisi ekonomi saat ini yang belum menunjukkan kemajuan dan harapan yang berarti sejak terjadinya krisis ekonomi , membuat lapangan kerja semakin sempit bahkan hampir-hampir tidak ada peluang bagi tenaga kerja yang ada untuk bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, sementara itu jumlah tenaga kerja semakin lama semakin meningkat sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam

memperoleh lapangan kerja. Kondisi yang tidak menentu ini, menuntut tenaga kerja termasuk diantaranya para penyandang cacat, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai guna mampu bersaing dalam pasar kerja .

Salah satu titik perhatian pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia adalah para penyandang cacat, mengingat populasi penyandang cacat di Indonesia setiap tahun terus bertambah jumlahnya karena berbagai faktor. Jumlah penyandang cacat dari hasil survey rumah tangga sosial ekonomi nasional (Susenas 2003) adalah 0.7 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Hasil survey Departemen Sosial Republik Indonesia diestimasikan berjumlah 3.11%, estimasi WHO terhadap penyandang cacat di Indonesia adalah 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Melihat data dan estimasi populasi penyandang cacat menjadi amat serius masalah tersebut untuk dipecahkan mengingat penyandang cacat, dibalik keterbatasannya, mereka mempunyai potensi dan bakat yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan bangsa. Di samping itu penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan warga Indonesia lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuannya serta berhak menikmati hasil pembangunan. Bilamana masalah tersebut tidak ditangani secara sungguh-sungguh maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan masalah kemiskinan baru, mengingat para penyandang cacat juga mempunyai keinginan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Pembahasan mengenai penyandang cacat dan upaya-upaya pemberdayaan yang dilaksanakan khususnya di Indonesia dewasa ini, tidak terlepas dari adanya strategi pembangunan sosial bagi kawasan ESCAP (komisi sosial ekonomi bagi kawasan Asia Pasifik) menjelang tahun 2000 dan masa sesudah itu oleh Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik IV mengenai kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial di Manila pada tahun 1991. Strategi tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan seluruh warga masyarakat di dalam kawasan ESCAP, dengan sasaran dasar yang hendak diwujudkan meliputi pengentasan kemiskinan, realisasi keadilan yang merata dan peningkatan partisipasi warga masyarakat. Berdasarkan kerangka tujuan dan sasaran tersebut, strategi diarahkan khusus secara langsung menyentuh kelompok-kelompok dari segi sosial kurang beruntung atau rawan di kawasan Asia Pasifik termasuk “warga penyandang cacat” (Agenda Aksi Dasawarsa Penyandang Cacat 1993 – 2002).

Sebagai tindak lanjut dari prioritas perhatian tersebut, sejumlah 33 negara yang menghadiri konferensi ESCAP ke-48 pada bulan April 1992 telah bersepakat mensponsori Resolusi No. 48/3 mengenai Dekade Penyandang Cacat Asia Pasifik 1993 – 2002. Pokok pikiran yang tertuang dalam resolusi tersebut menekankan kepada upaya secara serius terhadap pengkajian dan penanganan penyandang cacat di dalam negeri dan di wilayah teritorial negara masing-masing di kawasan ESCAP. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran dasawarsa penyandang cacat Asia Pasifik tersebut, maka disusun Program Aksi Dunia bagi penyandang cacat di kawasan Asia

Pasifik dengan bidang-bidang perhatian meliputi koordinasi nasional, peraturan perundang-undangan, informasi, kesadaran publik, aksesibilitas dan komunikasi, pendidikan, pelatihan dan penyaluran kerja, pencegahan penyebab kecacatan, pelayanan rehabilitasi, alat bantu kecacatan, organisasi swadaya, dan kerjasama regional. Setiap bidang-bidang perhatian ini, masing-masing mencakup sebuah daftar bagian perhatian yang ada relevansinya dengan pengembangan kebijakan yang mendukung terwujudnya partisipasi penuh dan persamaan warga penyandang cacat di Asia Pasifik (Agenda Aksi Dasawarsa Penyandang Cacat 1993-2002).

Ditetapkannya agenda aksi untuk penyandang cacat tersebut, maka segenap pemerintah yang ada di kawasan Asia Pasifik telah menyatakan komitmen mereka bersama bagi terwujudnya peran serta penuh warga penyandang cacat. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik, seiring dengan komitmennya terhadap resolusi dan program aksi untuk penyandang cacat di atas telah berupaya menetapkan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Penyandang cacat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, merupakan salah satu sasaran pelayanan dalam pembangunan pendidikan dan kesejahteraan sosial. sampai dengan saat ini pelayanan sosial terhadap penyandang cacat khususnya oleh pemerintah masih terbatas. Keterbatasan tersebut berakibat pada penanganan penyandang cacat yang tidak merata diberbagai tempat, sehingga sampai sekarang

masih terdapat penyandang cacat yang belum tersentuh oleh pembangunan itu sendiri. Populasi penyandang cacat menurut jenis kecacatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Populasi penyandang cacat menurut jenis kecacatan di Indonesia

No.	Jenis Kecacatan	Jumlah	%
1.	Cacat tubuh/Tuna daksa	556.001	35.08
2.	Cacat mata/Tuna netra	269.388	17.00
3.	Cacat rungu	226.180	14.27
4.	Cacat mental/Tuna grahita	109.304	6.90
5.	Cacat wicara	116.436	7.50
6.	Cacat fisik dan Mental/Ganda	192.554	12.15
7.	Cacat jiwa	83.210	5.25
8.	Cacat Rungu dan Wicara	31.817	2.00
	Jumlah	1.584.890	100.00

Sumber : BPS, SUSENAS 1998.

Jumlah di atas 72% atau 1.141.120 orang berada di wilayah pedesaan sementara sisanya yaitu 28% atau 443.770 berada di wilayah perkotaan. Melihat persebaran penyandang cacat dan dengan keterbatasan, pemerintah belum dapat menjangkau kedua wilayah tersebut secara keseluruhan, khususnya wilayah pedesaan di mana populasi penyandang cacat lebih terkonsentrasi. Adapun jumlah penyandang cacat di Propinsi Jawa Barat, hasil pendataan oleh Dinas Sosial Jawa Barat tahun 2002 sebanyak 72.830 jiwa, yang tersebar di 24 kabupaten/kota dan cenderung bergerak meningkat seiring dengan perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Menyimak data tersebut di atas, penyandang cacat merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu sasaran penting untuk dikembangkan,

mengingat pentingnya peningkatan SDM karena didasari oleh pemikiran bahwa semakin terbatasnya sumber daya alam yang hakekatnya *non renewable* serta keyakinan akan sumber daya manusia dalam mendukung proses suatu bangsa. Bukti-bukti kemampuan pengembangan sumber daya manusia telah ditunjukkan oleh Jepang yang diikuti oleh lima macan Asia dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi bangsanya dan kemampuan bersaing dengan bangsa lain dengan dukungan sumber daya alam yang terbatas. Keberhasilan itu ditentukan oleh berkembangnya pengusaha yang kuat, berhasil mendidik kaum pekerja yang mau bekerja giat serta proses belajar yang berkelanjutan.

Pengembangan SDM tidak terlepas dari pendidikan sebagai upaya pengembangan diri (*mind*), yaitu bentuk pengembangan kemampuan berpikir sederhana menuju kemampuan berpikir lebih kompleks, mengembangkan ranah *afektif, kognitif, psikomotorik* ditambah kemampuan mengambil keputusan, memecahkan masalah, berpikir kreatif dan berpikir kritis yang berujung pada metakognitif.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan di atas, adalah dengan memberikan akses atau kemudahan dan perlindungan khususnya bagi para penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 002/ U /1986 tentang Pendidikan terpadu bagi Anak Cacat. Selanjutnya ada kemudahan bagi penyandang untuk memperoleh pekerjaan, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 13 tahun

2003 tentang ketenagakerjaan pasal 5 yang berbunyi “ Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa deskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, dan dalam Kesepakatan Bersama antara Menteri Sosial, Menteri Tenaga kerja, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) No.A / B-05-1-85 / MS, Nomor 5 KEP-85 / Men / 189, Nomor : 003 / KPTS,DPP / II / 89 tentang Penyaluran / Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan dan Masyarakat.

Sementara dalam kenyataan, lingkungan pendidikan masih dihadapkan pada masalah koordinasi, baik dalam sistem pendidikan maupun dengan lingkungan masyarakat dan dunia kerja seperti yang dikemukakan Ayi Olim (1999 : 3) yang kemudian dibenarkan pula oleh Anton (2006) bahwa penyandang cacat sebagian besar yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan (72%) belum mampu mengakses pada layanan pendidikan dan kesehatan secara optimal dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta ini nampaknya terus berlanjut, salah satunya dapat dilihat dari hasil peninjauan awal terhadap sasaran penelitian penulis, yaitu penyandang cacat sebagai peserta pelatihan keterampilan menjahit di Balai Pemulihan Sosial Penyandang Cacat Ciababat Cimahi dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan sebagian berikutnya mengalami D.O sekolah. Dilihat dari sisi riwayat kecacatan, diantaranya dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam mengoptimalkan layanan kesehatan sehingga berujung pada kecacatan disamping dikarenakan cacat bawaan. Disisi lain



berdasarkan penuturan petugas penyelenggara pelatihan keterampilan menjahit, sementara ini berdasarkan data yang ada, belum ada kabar bahwa alumni hasil pelatihan keterampilan menjahit oleh BPSPC sukses bekerja dibidangnya. Pernyataan petugas penyelenggara tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Dalam kenyataan yang berbeda dan bergengsi seperti pentas olah raga dunia atau olimpiade penyandang cacat, melahirkan atlit-atlit yang berbakat dan menciptakan rekor-rekor dunia di cabang-cabang olah raga karena hal ini terkait dengan proses belajar dan pelatihan yang berkelanjutan sejak pendidikan anak usia dini. Dalam lingkup yang lebih sempit terlahir Asep Irama dan Ramona Purba yang mengalami cacat netra sukses di bidang tarik suara di Indonesia karena hal inipun terkait dengan proses pembelajaran yang terus menerus dan berkelanjutan.

Pelayanan pendidikan dari tahun ketahun melalui berbagai cara, terus menerus ditingkat kualitasnya, baik melalui peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, penyempurnaan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana maupun landasan hukumnya. Berbagai cara yang ditempuh tersebut untuk mengatasi masalah-masalah/kesenjangan-kesenjangan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat sekaligus untuk menjawab tantangan global yang semakin hari semakin membutuhkan peningkatan kualitas diri agar mampu bertahan hidup.

Berangkat dari sasaran layanan pendidikan/peserta didik dengan berbagai karakteristiknya, pendidikan nasional memiliki tiga subsistem pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Subsistem

pertama disebut pula pendidikan sekolah sedangkan subsistem pendidikan nonformal dan informal berada dalam cakupan pendidikan luar sekolah yaitu bentuk pendidikan yang tidak harus memiliki jenjang, waktu dan usia didik yang relatif teratur seperti pendidikan sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh (D.Sudjana, 2000 : 37) :

Pendidikan luar sekolah adalah setiap upaya pelayanan pendidikan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan dijalankan dengan sengaja, teratur, terencana, dan bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia berupa sikap, tindak dan karya, menuju terbentuknya manusia seutuhnya yang gemar belajar-mengajar agar mampu meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

Pendidikan Luar Sekolah sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional membuat tiga tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, yaitu :

1. Melayani warga belajar supaya tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan kehidupannya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (D. Sudjana, 2000 : 38)

Dari tiga tujuan tersebut, nampak upaya pendidikan luar sekolah (PLS) untuk membelajarkan semua orang dalam setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan termasuk di dalamnya kepada para penyandang cacat, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) memberikan gagasan pemecahan inovatif, yaitu melalui jalinan



Salah satu tugas departemen seperti yang diungkapkan pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada pasal 26 ayat 1, menekankan pada pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Didukung pada pasal 26 ayat 2, bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Serta di dukung oleh pasal 26 ayat 5, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha sendiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan maupun dinas tenaga kerja dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para penyandang cacat tubuh sebagai bekal berharga untuk mengatasi kesenjangan, adalah salah satunya dengan memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya bagi penyandang cacat tubuh untuk mengikuti program kegiatan pelatihan keterampilan. Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah Balai Pemulihan Sosial Penyandang cacat Cibabat Cimahi, merupakan suatu lembaga yang berada di bawah pembinaan Dinas Sosial Jawa Barat, mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan yang berupaya menggali, mengembangkan dan meningkatkan potensi para penyandang cacat.

Bentuk-bentuk pelatihan keterampilan yang diselenggarakan BPSPC bagi penyandang cacat dimaksud meliputi : keterampilan menjahit putra/putri, tata rias putri, elektronika putra dan montir motor putra. Terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan oleh program BPSPC kepada peserta pelatihan yang dipersiapkan sebagai pekerja atau membuka usaha sendiri harus benar-benar teruji di dalam praktek dengan memenuhi standar-standar pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang pada dasarnya mencakup delapan aspek standar pendidikan yaitu : *standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.*

Hasan (1999 : 117-118) dalam Rahmat (2006: 18) mengemukakan bahwa :

Tujuan khusus memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup kepada warga belajar agar :

- a. Memiliki usaha keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja baik bekerja mandiri (wira usaha) dan atau bekerja pada suatu perusahaan produksi/jasa dengan penghasilan semakin layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- b. Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing dipasar global.
- c. Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya.
- d. Mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayat (*life long education*) dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan disetiap lapisan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diungkapkan bahwa suatu keterampilan bagi pekerja ditandai oleh kepemilikan sertifikat, kelayakan dan pengakuan untuk memasuki lingkungan kerja.

B. Identifikasi Masalah

Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat tubuh yang diselenggarakan oleh Balai Pemulihan Sosial Penyandang Cacat Cibabat Cimahi adalah program yang dilaksanakan rutin setiap tahun, yang mana pelaksanaannya membutuhkan durasi waktu delapan bulan. Jenis keterampilan yang ditawarkan kepada peserta adalah terdiri atas empat jenis keterampilan yaitu jenis keterampilan menjahit putra/putri, montir motor putra, elektronika putra dan tata rias putri.

Berdasarkan data yang ada, sebagian besar peserta yang berjumlah 75 orang angkatan 2006, memilih jenis keterampilan menjahit yaitu sebanyak 36 orang dengan perincian 23 orang laki-laki dan sisanya 13 orang perempuan. Asumsi penulis kondisi ini didasarkan adanya keyakinan dan harapan dari peserta pelatihan, yaitu kemudahan dalam memperoleh pekerjaan atau membuka usaha menjahit/konveksi setelah menamatkan pelatihan keterampilan di tempat asalnya masing-masing.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang diperoleh melalui observasi dilokasi penelitian, wawancara awal dengan salah seorang penyelenggara, serta studi dokumentasi, dapat diinformasikan bahwa disinyalir belum semuanya alumni dapat terserap dalam lapangan pekerjaan atau mampu membuka usaha sendiri. Setelah dicermati, penulis menduga bahwa penyelenggaraan pelatihan keterampilan disinyalir belum optimal karena berbagai permasalahan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Disinyalir faktor latar belakang kehidupan peserta didik yang menyangkut riwayat dan jenis kecacatan serta keadaan tingkat pendidikan formal penyandang cacat yang dapat berkontribusi terhadap pelatihan terabaikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pelatihan.
2. Disinyalir Perencanaan, pelaksanaan/proses pelatihan keterampilan selama ini belum sepenuhnya memenuhi standar nasional pendidikan dan belum adanya benang merah kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Disinyalir pelibatan komponen sistem yang terkait dalam proses pelatihan keterampilan belum memberikan kontribusi maksimal bagi keberhasilan pencapaian tujuan.

Penulis menduga bahwa kurang optimalnya proses pelatihan yang meliputi kegiatan perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan, upaya pencapaian tingkat kompetensi serta dampak dari kegiatan tersebut merupakan penyebab timbulnya berbagai permasalahan. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa

suatu pelatihan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pelatihan serta kegiatan evaluasi amat yang baik, sangat menentukan keberhasilan sebuah program kegiatan.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan fokus masalah utama agar pembatasan masalah menjadi lebih jelas dan memungkinkan untuk merumuskan masalah dengan baik dalam pertanyaan penelitian. Penulis merumuskan masalah dan pembatasan masalah dengan pertanyaan penelitian, yaitu :

“Bagaimana Proses Pelatihan Keterampilan Menjahit dan dampaknya terhadap keterserapan Penyandang Cacat di Lapangan Kerja?

Rumusan masalah tersebut di atas, dirinci ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kehidupan penyandang cacat tubuh yang berkontribusi terhadap kegiatan pelatihan keterampilan di BPSPC Cibabat Cimahi?
2. Bagaimana perencanaan pelatihan keterampilan menjahit yang diselenggarakan oleh BPSPC Cibabat Cimahi ?
3. Bagaimana proses pelatihan keterampilan menjahit di BPSPC Cibabat Cimahi ?
4. Bagaimana hasil pelatihan keterampilan menjahit di BPSPC Cibabat Cimahi ?
5. Bagaimana upaya pencapaian tingkat kompetensi penyandang cacat tubuh sebagai lulusan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh BPSPC Cibabat Cimahi?

6. Bagaimana dampak pelatihan keterampilan menjahit terhadap keterserapan penyandang cacat tubuh di lapangan kerja ?

D. Definisi Operasional

1. Penyandang cacat

Pengertian penyandang cacat menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 1 ayat 1: adalah bahwa penyandang cacat yaitu orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri atas:

- a. penyandang cacat fisik ;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Mengacu pada pengertian tersebut maka yang dimaksud penyandang cacat pada penelitian ini yaitu setiap orang berusia 15-25 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau cacat tubuh dan tidak cacat ganda sehingga merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya akan tetapi secara fisik dinyatakan sehat dan tidak berpenyakit menular oleh dokter.

2. Pelatihan.

Pengertian **pelatihan** dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang terencana yang dilakukan secara sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan,

dan sikap penyandang cacat tubuh melalui pengalaman belajar dan ditujukan untuk mencapai kinerja yang efektif.

3. Kompetensi Penyandang Cacat Tubuh

Pengertian kompetensi penyandang cacat tubuh dalam penelitian ini adalah kemampuan implementasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dalam kegiatan menjahit yang diperoleh penyandang cacat tubuh sebagai hasil pelatihan keterampilan menjahit yang diselenggarakan oleh BPSPC Cibabat Cimahi didalam kehidupan bermasyarakat.

4. Latar Belakang Kehidupan Penyandang Cacat

Pengertian latar belakang kehidupan dalam penelitian ini adalah keadaan fisik yaitu yang menyangkut jenis kecacatan. Keadaan non fisik menyangkut riwayat kecacatan dan pendidikan formal yang dimiliki penyandang cacat tubuh sebagai peserta didik yang berkontribusi terhadap kegiatan pelatihan keterampilan menjahit.

5. Perencanaan Pelatihan Keterampilan

Pengertian perencanaan pelatihan keterampilan dalam penelitian ini adalah upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien dan efektif.

6. Proses Pelatihan Keterampilan.

Pengertian proses pelatihan keterampilan dalam penelitian ini adalah interaksi edukasi antara masukan sarana yang berupa kurikulum, instruktur menjahit, tenaga

kependidikan, perpustakaan, fasilitas, alat, biaya dan pengelola program dengan masukan mentah yaitu penyandang cacat tubuh sebagai peserta didik. Proses mencakup kegiatan pembelajaran dan evaluasi.

7. Hasil Pelatihan Keterampilan

Pengertian hasil pelatihan keterampilan menjahit merupakan tujuan antara yang mencakup kuantitas yaitu jumlah peserta didik yang dapat menamatkan kegiatan pelatihan keterampilan menjahit, dan kualitas yaitu adanya perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

8. Upaya Pencapaian tingkat Kompetensi

Pengertian upaya pencapaian tingkat kompetensi dalam penelitian ini adalah kegiatan pelatihan keterampilan menjahit yang dilakukan agar peserta didik memiliki kompetensi menjahit tingkat terampil yang mencakup ranah pengetahuan, ketrampilan menjahit, sikap positif serta nilai baru.

9. Dampak Pelatihan Keterampilan

Pengertian dampak pelatihan keterampilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak proses dan dampak hasil dari kegiatan pelatihan keterampilan menjahit yang diselenggarakan oleh Balai Pemulihan Sosial Penyandang Cacat Cibabat. Dampak proses adalah rangkaian kegiatan sebagai pengaruh timbal balik dalam suatu komponen program pelatihan. Sedangkan dampak hasil pelatihan adalah

merupakan rangkaian akibat yang muncul setelah program pelatihan selesai dilaksanakan yaitu berupa keterserapan peserta didik dalam lapangan kerja, mampu membelajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya pada orang lain, mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan nilai baru peserta didik.

10. Lapangan Kerja

Pengertian lapangan kerja dalam penelitian ini adalah suatu tempat yang digunakan untuk mencari nafkah/ mata pencaharian dengan persyaratan calon pekerja termasuk para penyandang cacat tubuh, memiliki kompetensi dibidang menjahit.

11. Keterampilan

Pengertian keterampilan dalam penelitian ini adalah kemampuan penyandang cacat tubuh sebagai peserta didik menerapkan keterampilan menjahit setelah mengikuti pelatihan keterampilan dalam lingkungan sehari-hari dan dunia kerja peserta didik

12. Terserap di lapangan kerja.

Pengertian terserap di lapangan kerja dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dimana lulusan dari suatu kegiatan pelatihan keterampilan menjahit yang diselenggarakan oleh BPSPC Cibabat Cimahi dipersiapkan untuk diterima bekerja dalam suatu perusahaan atau membuka usaha sendiri/wirausaha karena keterampilan yang dimilikinya.

13. Balai Pemulihan Sosial Penyandang Cacat (BPSPC)

Adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2000.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui latar belakang kondisi kehidupan penyandang cacat yang berkontribusi terhadap kegiatan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh BPSPC Cibabat Cimahi ?
2. Mengetahui perencanaan pelatihan keterampilan menjahit yang diselenggarakan oleh BPSPC Cibabat Cimahi ?
3. Mengetahui proses pelatihan keterampilan menjahit di BPSPC Cibabat Cimahi ?
4. Mengetahui hasil pelatihan keterampilan menjahit di BPSPC Cibabat Cimahi ?
5. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencapai tingkat kompetensi penyandang cacat tubuh sebagai lulusan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh BPSPC Cibabat Cimahi
6. Mengetahui dampak pelatihan keterampilan menjahit terhadap keterserapan penyandang cacat tubuh di lapangan kerja ?

Kegunaan penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan ilmu bagi peneliti, namun diharapkan memiliki kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian sebagai pengembangan wawasan dan penguatan kognitif pada tingkat akademik, yaitu memberikan informasi empirik dibidang kajian Pendidikan Luar Sekolah . selain itu penelitian ini juga ingin melihat relevansi teori-teori pendidikan orang dewasa dalam kaitannya dengan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat di Balai Pemulihan Sosial Penyandang Cacat Cibabat Cimahi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini tak lain guna memberikan gambaran secara deskriptif mengenai proses pembelajaran dan merupakan refleksi dari kinerja para praktisi serta dapat dikembangkan di lembaga-lembaga terkait pada pengembangan pelatihan dan PLS pada umumnya serta memberikan masukan perbaikan bagi peningkatan kualitas dan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pelatihan keterampilan di BPSPC Cibabat Cimahi.

E. Kerangka Pemikiran

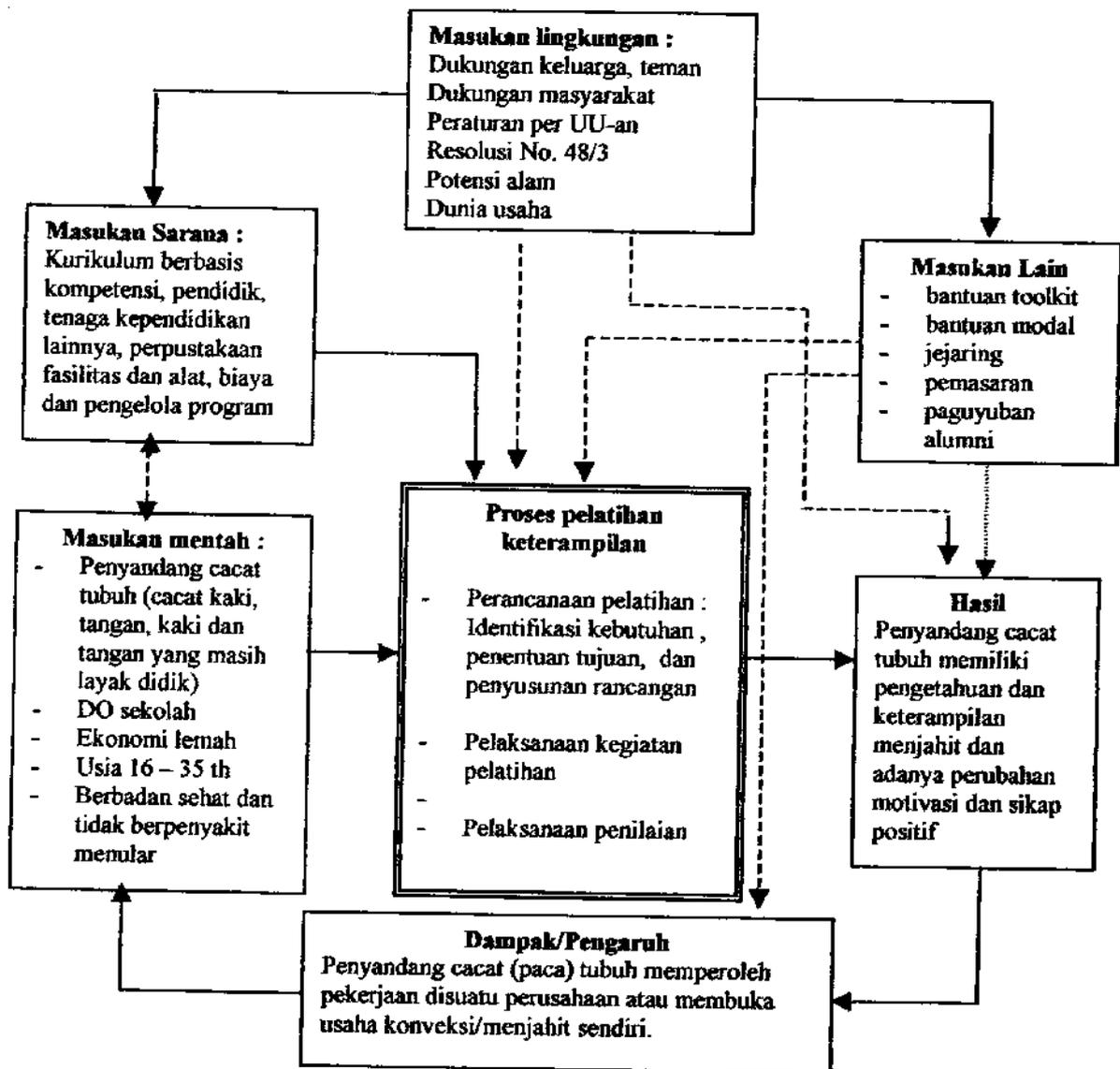
Pelatihan keterampilan menjahit merupakan satuan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) karena kegiatan tersebut berjangka pendek dengan waktu kurang dari satu tahun dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan teras peserta didik dalam



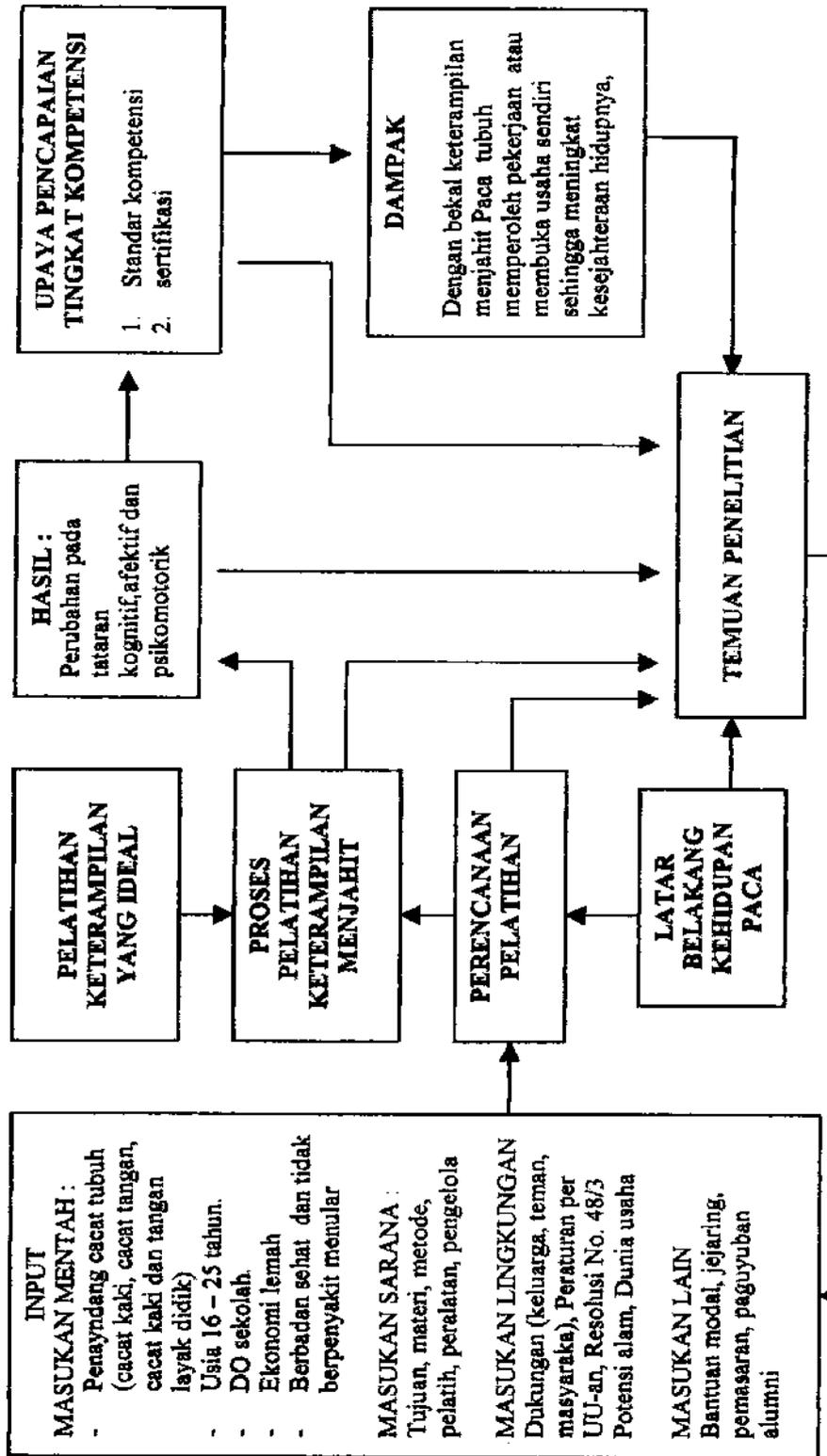
meningkatkan kemampuan sosial ekonomi yang berguna bagi masa depan kehidupannya yang ditandai dengan perolehan pekerjaan atau berwirausaha.

Prinsip dasar yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keterampilan adalah proses belajar. Belajar dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang relatif menetap dari perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman dan latihan. Pelatihan sebagai proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik perlu memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagai salah satu kegiatan pendidikan luar sekolah, yaitu memerlukan komponen-komponen tersendiri yang berbeda dengan pendidikan formal.

Adapun komponen-komponen tersebut secara keseluruhan meliputi masukan mentah (*raw input*), masukan sarana (*instrumental input*), masukan lingkungan (*environmental input*), masukan lainnya (*others input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan pengaruh (*impact*). Untuk itu kerangka pemikiran yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penelitian ini adalah menggunakan komponen-komponen dalam sistem pendidikan luar sekolah dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1
Paradigma kegiatan pelatihan keterampilan
Modifikasi dari Sudjana, D. (2004 : 34)



Gambar 2
Paradigma Penelitian

F. Sistematika Tulisan

Tesis ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : memuat latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian (manfaat praktis dan akademis), kerangka pemikiran dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORITIK : memuat landasan teoritik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan untuk memperluas wawasan sebelum turun lapangan serta berfungsi sebagai alat analisis terhadap hasil penelitian. Pada bagian menjawab pertanyaan penelitian memuat landasan teoritik tentang konsep pelatihan, konsep manajemen program pendidikan luar sekolah konsep kompetensi, konsep pendidikan kecakapan hidup, konsep keterampilan fungsional, konsep pendidikan luar sekolah. Pada bagian memperluas wawasan memuat tinjauan tentang penyandang cacat dengan beragam definisi dan permasalahannya. Pada bab II ini pula dimuat temuan-temuan penelitian yang relevan dan pembahasan hak dasar yang relevan.

BAB III PROSEDUR PENELITIAN : menyajikan tentang metode penelitian yang dipilih oleh peneliti, teknik pengumpulan data yang dipergunakan, subjek penelitian dan penetapan kasus penelitian, teknik pengolahan, pemeriksaan keabsahan data dan bagaimana menganalisis suatu data serta bagaimana langkah-langkah melaksanakan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : yaitu membahas temuan lapangan atau penelitian, yang akan dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep pelatihan, pendidikan luar sekolah, konsep pembelajaran orang dewasa dan tinjauan penyandang cacat. Analisis terhadap temuan lapangan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum program pelatihan keterampilan menjahit dalam peningkatan kompetensi penyandang cacat tubuh dan keterserapannya di lapangan kerja, deskripsi proses pelatihan keterampilan menjahit, kondisi kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI : memuat kesimpulan terhadap temuan lapangan hasil analisis dengan menggunakan komponen-komponen pendidikan luar sekolah dan memuat bagaimana temuan lapangan berimplikasi pada teoritis dan praktis. Saran dan rekomendasi yang muncul dari temuan lapangan ditujukan kepada UPTD Balai Pemulihan Sosial Penyandang Cacat, Dinas Sosial Jawa Barat dan instruktur untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pembinaan lanjut program pelatihan keterampilan menjahit bagi penyandang cacat.



